

## IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA PADA KURIKULUM 2013 MELALUI PENDEKATAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP

**Purnomo Ananto**

Politeknik Negeri Media Kreatif

*purnomo.ananto@polimedia.ac.id*

### *Abstrak*

*Pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia adalah pendidikan yang mampu membangun karakter yang baik sebagai warga negara yang disertai dengan pendidikan yang melatih kemampuan bersaing dalam persaingan internasional melalui kreativitas fisik dan mental yang mampu menanggapi perubahan yang terjadi. Kebutuhan ini hanya dapat terjawab jika sistem pendidikan mampu menciptakan saling keterkaitan antara kurikulum yang dipelajari untuk menunjang tujuan pendidikan, termasuk di dalamnya pendidikan Pancasila, yang melekat pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kurikulum 2013 dirancang untuk memperkuat kompetensi siswa dari sisi pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara utuh. Proses pencapaiannya melalui pembelajaran sejumlah mata pelajaran yang dirangkai sebagai suatu kesatuan yang saling mendukung pencapaian kompetensi tersebut. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah salah satu mata pelajaran yang diajarkan untuk jenjang SMP/MTs, yang dirancang untuk menghasilkan siswa yang memiliki keimanan dan akhlak mulia sebagaimana diarahkan oleh falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila sehingga dapat berperan sebagai warga negara yang efektif dan bertanggung jawab. Pembelajaran dengan pendekatan pendidikan kecakapan hidup, akan menjadi alternatif yang sangat menjanjikan, karena yang semula proses pembelajaran berpusat pada guru menuju berpusat pada siswa. Artinya sekarang guru harus lebih banyak mendengarkan peserta didiknya saling berinteraksi, berargumentasi, berdebat, dan berkolaborasi, serta bermain peran (Role Play). Fungsi guru dari pengajar berubah dengan sendirinya menjadi fasilitator bagi para peserta didiknya. Melalui pendekatan ini pula dari satu arah menuju interaktif, artinya saat ini harus terdapat interaksi yang cukup antara guru dan peserta didik dalam berbagai bentuk komunikasinya. Guru harus berusaha membuat kelas semenarik mungkin melalui berbagai pendekatan interaksi yang dipersiapkan dan dikelola.*

*Kata Kunci : Proses Pembelajaran, Kurikulum 2013, Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan kecakapan hidup.*

### **PENDAHULUAN**

Pendidikan menjadi salah satu modal dasar sekaligus penting bagi seseorang agar dapat berhasil dan mampu meraih kesuksesan dalam kehidupannya. Visi

pendidikan sesungguhnya diharapkan dapat mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya (Soetopo, H. 2013 : iii). Manusia yang mempunyai daya saing, penuh kreasi, mandiri, berdaya dan berpartisipasi aktif dalam

peningkatan hidup sesama. Selain merupakan fungsi pembangunan bidang ekonomi, persoalan kesejahteraan merupakan aspek penting yang harus dicapai dalam rangka proses pendidikan. Pendidikan yang mensejahterakan adalah pendidikan yang membebaskan, terutama membebaskan dari kebodohan, keterbelakangan dan kemiskinan. Sebenarnya inilah tiga masalah pokok yang menjadi kewajiban sektor pendidikan.

Filosofi Brameld tentang pendidikan disebut *reconstructionism*. Meski dia bukan orang pertama yang datang dengan ide ini, tapi dia adalah salah satu yang pertama untuk mendukung secara terbuka. Dalam menanggapi krisis yang ada periode waktu, ia percaya *reconstructionism* di sekolah adalah solusi untuk masalah tersebut. Dalam bukunya, Pendidikan sebagai kekuatan ia jelas menguraikan dua peran utama *reconstructionism*.

*Education has two major roles: to transmit culture and to modify culture. When American culture is in a state of crisis, the second of these roles—that of modifying and innovating—becomes more important. Reconstructionism, Brameld affirmed, is a crisis philosophy; the reconstructionist is very clear as to which road mankind should take, but he [or she] is not at all clear as to which road it will take. (Brameld, Theodore, 1965:75).*

Pandangan Brameld yang menyatakan bahwa pendidikan dapat memiliki dua peran utama: yaitu untuk menyampaikan/melestarikan budaya dan memodifikasi atau merekonstruksi

budaya yang ada agar sesuai dengan perkembangan jaman. *Reconstructionism*, Brameld menegaskan, adalah filosofi krisis, rekonstruksionis akan memperjelas jalan mana yang terbaik harus diambil oleh manusia, atau malah sebaliknya.

Ekspektasi yang tinggi terhadap dunia pendidikan ini melahirkan tanggung jawab yang besar bagi para praktisi pendidikan dan para pengambil kebijakan di bidang pendidikan. Oleh karenanya, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dibidang pendidikan dalam rangka untuk menghadapi persaingan globalisasi yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan sumber daya manusia di era globalisasi. Namun, pada praktiknya niat baik ini terhalang oleh paradigma pendidikan yang berorientasi pada hasil pembelajaran dari pada memperhatikan proses.

Di sisi lain Kebijakan pendidikan malah menghasilkan kontroversi yang tidak berkesudahan dengan masih digelarnya tes sumatif dan ujian nasional yang dianggap sebagai upaya standardisasi nasional. Meskipun telah banyak protes disampaikan kepada pemerintah, kenyataannya kebijakan ini terus berlanjut bahkan standar kelulusan terus dinaikkan. Menurut penulis, pilihan kebijakan ini sangat merisaukan karena bukannya memperbaiki kemampuan sumber daya manusia, tetapi malah membuat pelajar merasa tertekan dan frustrasi. Beberapa kasus memperlihatkan bahwa banyak pelajar yang frustrasi karena tidak lulus. Frustrasi tersebut muncul melalui tindakan bunuh diri, pengrusakan fasilitas sekolah hingga yang paling laten adalah keputusan yang

mengendap. Kondisi ini bukannya memperkuat daya saing malah makin melemahkan daya saing sumber daya manusia bangsa Indonesia.

Pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia adalah pendidikan yang mampu membangun karakter yang baik sebagai warga negara yang disertai dengan pendidikan yang melatih kemampuan bersaing dalam persaingan internasional melalui kreativitas fisik dan mental yang mampu menanggapi perubahan yang terjadi. Kebutuhan ini hanya dapat terjawab jika sistem pendidikan mampu menciptakan saling keterkaitan antara kurikulum yang dipelajari untuk menunjang tujuan pendidikan, termasuk di dalamnya pendidikan Pancasila, yang melekat pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Kurikulum 2013 dirancang untuk memperkuat kompetensi siswa dari sisi pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara utuh. Proses pencapaiannya melalui pembelajaran sejumlah mata pelajaran yang dirangkai sebagai suatu kesatuan yang saling mendukung pencapaian kompetensi tersebut. Apabila pada jenjang SD/MI semua mata pelajaran digabung menjadi satu dan disajikan dalam bentuk tema-tema, pada jenjang SMP/MTs pembelajaran sudah mulai dipisah-pisah menjadi mata pelajaran. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam Kurikulum 2013, siswa diajak menjadi berani untuk mencari sumber belajar lain yang tersedia dan terbentang luas di sekitarnya.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah salah satu

mata pelajaran yang diajarkan untuk jenjang SMP/MTs, yang dirancang untuk menghasilkan siswa yang memiliki keimanan dan akhlak mulia sebagaimana diarahkan oleh falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila sehingga dapat berperan sebagai warga negara yang efektif dan bertanggung jawab. Pembahasannya secara utuh mencakup empat pilar kebangsaan yang terkait satu sama lain, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dirancang berbasis aktivitas terkait dengan sejumlah tema kewarganegaraan yang diharapkan dapat mendorong siswa menjadi warga negara yang baik melalui kepeduliannya terhadap permasalahan dan tantangan yang dihadapi masyarakat sekitarnya. Kepedulian tersebut ditunjukkan dalam bentuk partisipasi aktif dalam pengembangan komunitas yang terkait dengan dirinya. Kompetensi yang dihasilkan bukan lagi terbatas pada kajian pengetahuan dan keterampilan penyajian hasil kajiannya dalam bentuk karya tulis, tetapi lebih ditekankan kepada pembentukan sikap dan tindakan nyata yang harus mampu dilakukan oleh tiap siswa. Dengan demikian akan terbentuk sikap yang cinta dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Pada artikel ini penulis membatasi diri pada pelaksanaan kurikulum 2013 mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs kelas VII. Tujuan penulisan ini adalah untuk melakukan rekonstruksi pemikiran terhadap implementasi pembelajaran

Pendidikan Pancasila pada Kurikulum 2013 melalui pendekatan pendidikan kecakapan hidup.

Sarana dan prasarana untuk mengembangkan pendidikan yang bermutu adalah sesuatu keharusan guna menunjang kurikulum yang berbasis pada kompetensi peserta didik. "...kurikulum dapat kita definisikan sebagai sejumlah informasi dan pengalaman yang ingin disampaikan kepada peserta didik". (Tilaar, H.A.R. 2012:357). Sebelum diberlakukannya kurikulum 2013 kurikulum yang digunakan adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau sering disingkat KTSP. Pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan telah diberikan peluang yang sangat besar kepada guru untuk mengembangkan kreativitasnya. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagai kepanjangan tangan pemerintah hanya membuat standarnya saja, yaitu menentukan standar kelulusan yang kemudian dijabarkan ke dalam standar isi yang memuat bahan kajian, mata pelajaran, serta kegiatan belajar yang diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap, hasilnya juga masih jauh dari harapan. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dalam KTSP masih sangat umum dan perlu penjabaran dari guru di masing-masing satuan pendidikan. Penjabaran ini tidak hanya sebatas penentuan indikator, tetapi juga berkenaan dengan materi, metode, media pembelajaran, dan urutan aktivitas pembelajaran, dalam implementasi KTSP ini guru nyaris tidak berperan sebagaimana yang diharapkan.

Saat ini pada beberapa sekolah mulai diberlakukan kurikulum 2013, hal

ini disebabkan pengembangan kurikulum perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal. Disamping itu, di dalam menghadapi tuntutan perkembangan zaman, dirasa perlu adanya penyempurnaan pola pikir dan penguatan tata kelola kurikulum serta pendalaman dan perluasan materi. Dalam hal pembelajaran yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya penguatan proses pembelajaran dan penyesuaian beban belajar agar dapat menjamin kesesuaian antara apa yang diinginkan dengan apa yang dihasilkan. Namun demikian perubahan kurikulum diyakini tidak akan memiliki dampak yang berarti manakala tidak didukung infra struktur dan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang memadai.

"Dalam kenyataannya, kurikulum yang diberlakukan tidak beranjak dari kurikulum yang sangat formal, yang ditentukan dari pusat kekuasaan sampai ke pelosok-pelosok sekolah di seluruh tanah air. Melihat kepada kebutuhan anak dan kebutuhan masyarakat Indonesia, maka mekanisme pengembangan kurikulum macam itu tentunya bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangan ilmiah". (Tilaar, H.A.R. 2012:357).

### **Karakteristik Kurikulum 2013**

Karakteristik kurikulum 2013 jika dilihat dari elemen kompetensi lulusannya nampaknya diarahkan adanya peningkatan dan keseimbangan *soft skills* dan *hard skills* yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan,

dan pengetahuan, apabila dilihat dari Kedudukan mata pelajaran (ISI), maka kompetensi yang semula diturunkan dari matapelajaran berubah menjadi mata pelajaran dikembangkan dari kompetensi. Pada kurikulum 2013 ini Tujuan Instruksional Khusus (TIK) menjadi media semua matapelajaran; untuk Pengembangan diri terintegrasi pada setiap matapelajaran dan ekstrakurikuler; Jumlah matapelajaran dari 12 menjadi 10; dan Jumlah jam bertambah 6 JP/minggu akibat perubahan pendekatan pembelajaran. Adapun struktur kurikulum SMP/MTs ada penambahan jam belajar per minggu dari semula 32, 32, dan 32 **menjadi** 38, 38 dan 38 untuk masing-masing kelas VII, VIII, dan IX. Sedangkan lama belajar untuk setiap jam belajar di SMP/MTs tetap yaitu 40 menit.

Jika dilihat dari sisi Proses pembelajaran yang dilakukan melalui Pendekatan saintifik dan kontekstual, dimana Kemampuan kreativitas diperoleh melalui; Observing [mengamati]; Questioning [menanya]; Associating [menalar]; Experimenting [mencoba]; dan Networking [Membentuk jejaring] implementasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

- Standar Proses yang semula terfokus pada Eksplorasi, Elaborasi, dan Konfirmasi dilengkapi dengan Mengamati, Menanya, Mengolah, Menyajikan, Menyimpulkan, dan Mencipta.
- Belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga di

lingkungan sekolah dan masyarakat

- Guru bukan satu-satunya sumber belajar.
- Sikap tidak diajarkan secara verbal, tetapi melalui contoh dan teladan
- IPA dan IPS masing-masing diajarkan secara terpadu

Jika dibandingkan dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Perbedaan Essensial dengan kurikulum 2013 adalah sebagai berikut :

- ✓ Tiap mata pelajaran mendukung semua kompetensi [sikap, keterampilan, pengetahuan]
- ✓ Mata pelajaran dirancang terkait satu dengan yang lain dan memiliki kompetensi dasar yang diikat oleh kompetensi inti tiap kelas
- ✓ Semua mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang sama [saintifik] melalui mengamati, menanya, mencoba, menalar,....
- ✓ TIK merupakan sarana pembelajaran, dipergunakan sebagai media pembelajaran mata pelajaran lain
- ✓ Materi disusun seimbang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan

- ✓ Pendekatan pembelajaran berdasarkan pengamatan, pertanyaan, pengumpulan data, penalaran, dan penyajian hasilnya melalui pemanfaatan berbagai sumber-sumber belajar [siswa mencari tahu]
- ✓ Penilaian otentik pada aspek kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan berdasarkan portofolio.

Khusus untuk Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Perbedaan antara KTSP dengan kurikulum 2013 mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs kelas VII dengan materi utama, yaitu : Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berkomitmen terhadap Pancasila sebagai Dasar Negara; Menumbuhkan Kesadaran Berkonstitusi; Menumbuhkan Kesadaran dan Keterikatan terhadap Norma; Memaknai Nilai Kesejarahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Pentingnya Daerah dalam Bingkai NKRI ; Memelihara Semangat Persatuan Indonesia; dan Bertoleransi dalam Keberagaman, perbedaan dimaksud adalah sebagai berikut:

- Jika pada KTSP materi disajikan berdasarkan empat pilar dengan pembahasan yang terpisah-pisah, maka pada kurikulum 2013 materi disajikan tidak berdasarkan pada pengelompokan menurut empat pilar kebangsaan

tetapi berdasarkan keterpaduan empat pilar dalam pembentukan karakter bangsa

- Pada KTSP materi disajikan berdasarkan pasokan yang ada pada empat pilar kebangsaan, sedangkan pada kurikulum 2013 materi disajikan berdasarkan kebutuhan untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab (taat norma, asas, dan aturan)
- Pada KTSP tidak ada penekanan pada tindakan nyata sebagai warga negara yang baik, pada kurikulum 2013 adanya kompetensi yang dituntut dari siswa untuk melakukan tindakan nyata sebagai warga negara yang baik; dan
- Pada KTSP Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan disajikan sebagai pengetahuan yang harus dihafal, pada kurikulum 2013 Pancasila dan Kewarganegaraan bukan hanya pengetahuan, tetapi ditunjukkan melalui tindakan nyata dan sikap keseharian.

Untuk proses penilain pada kurikulum 2013 dilakukan melalui Penilaian Otentik, yaitu dengan cara :

- ✓ Penilaian berbasis portofolio;

- ✓ Pertanyaan yang tidak memiliki jawaban tunggal;
- ✓ Memberi nilai bagi jawaban nyeleneh;
- ✓ Menilai proses pengerjaannya bukan hanya hasilnya; dan
- ✓ Penilaian spontanitas/ekspresif.

Melihat karakteristik kurikulum 2013 tersebut nampaknya sangat tepat untuk menggunakan pendekatan pendidikan kecakapan hidup pada proses pembelajarannya, yang memang lebih menekankan proses dari pada hasil.

Institusi pendidikan dan praktik pendidikan Indonesia masih berupa pola-pola melanjutkan pendidikan penjajahan dan budaya kolonial dari masa lampau. Sebagian institusi pendidikan Indonesia merupakan pencangkokan lembaga pendidikan negara-negara yang sudah maju, sehingga dalam praktik sehari-hari, hasil pendidikan kurang mencerminkan aspirasi bangsa sendiri, kurang mengembangkan sifat-sifat kepribumian yang berasaskan Pancasila, kurang mengembangkan unsur-unsur budaya lokal dan nasional. Peserta didik yang menerima pendidikan semacam ini cenderung mengalami alienasi terhadap budaya sendiri, yang akhirnya merasa asing pula terhadap hakikat diri sendiri dan lingkungannya serta pada akhirnya menjauh dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara kita.

“Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai dan gagasan-gagasan dasar yang dapat dilihat dalam sikap, perilaku, dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bersifat khas sebagai refleksi perilaku bangsa Indonesia dan tercermin dalam setiap kehidupannya. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat dinamis. Artinya, upaya pengembangan sesuai dengan perubahan dan tuntutan masyarakat bukan sesuatu yang tabu sehingga nilai-nilai dasar itu tidak menjadi beku, kaku, dan melahirkan sifat fanatik yang tidak logis. Atas dasar tersebut, bangsa Indonesia telah menetapkan Pancasila sebagai ideologi terbuka”. (Soegito, A.T, dkk. 2011:123)

Pendidikan dan politik memiliki kaitan yang sangat erat. Keduanya diarahkan pada tujuan hidup manusia dan masyarakat, menginginkan kehidupan yang berbahagia, selain juga diarahkan untuk membentuk kehidupan bersama. Indonesia yang tengah berkembang merupakan pencerminan dari kekuatan sosial politik kaum elit yang berkuasa dan refleksi kekuatan penguasa pada ide-ide politiknya. Sekolah dan institusi pendidikan merupakan sarana penyuaapan peserta didik dengan doktrin-doktrin politik serta propaganda nilai-nilai budaya yang dianggap paling bermanfaat oleh para penguasa. Semua perilaku ini ditujukan demi penguasaan dan pengendalian rakyat secara lebih efisien. Masyarakat dituntut kepastian politik dan ketundukan rohaniah secara total, yakni tunduk secara mutlak kepada penguasa. Semuanya ini yang kemudian melahirkan konsep politisasi

pendidikan. "...Jangan pula 'politik dijadikan panglima' untuk melemahkan pendidikan nasional sebagai wahana memelihara dan meneruskan cita-cita kebangsaan" (Malik, Fajar. A. 2012:5)

Secara historis, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia mengalami banyak perubahan baik secara konseptual maupun kontekstual. Selain itu, nama, orientasi maupun substansi dan pendekatan pembelajarannya mengikuti dinamika politik yang berkembang di Indonesia. Pada dasarnya kurikulum dikembangkan untuk mengimbangi perkembangan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan seni yang semakin cepat. Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebelumnya misalnya pada kurikulum 1994 mengarahkan peserta didik untuk menguasai materi pengetahuan yang diberikan pada peserta didik sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kurikulum 1994 menciptakan peserta didik yang mampu menjawab soal dan mengerjakan tugas namun minim kompetensi. Kurikulum 2004 berusaha menjawab kekurangan kurikulum sebelumnya dengan berorientasi pada kompetensi peserta didik.

Kurikulum 2004 dikenal juga sebagai kurikulum berbasis kompetensi (selanjutnya disingkat menjadi (KBK). KBK diartikan sebagai suatu konsep kurikulum yang menekankan pada kemampuan melakukan tugas-tugas dengan standard performansi tertentu sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. Dalam kurikulum 2004 (KBK),

PPKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter. Tujuan ini sejalan dengan amanat Pancasila dan UUD 1945.

Kurikulum 2013 yang telah diluncurkan pemerintah pada pertengahan tahun 2013 ini bisa jadi akan mengalami nasib yang sama dengan kurikulum yang sudah dan pernah ada sebelumnya jika tidak ada komitmen yang sungguh-sungguh dari para pelaku pendidikan terutama para pengambil kebijakan, dan 3 pilar pelaksana kurikulum yaitu pengawas, kepala sekolah dan guru sebagai ujung tombak yang berhadapan langsung dengan peserta didik, meskipun Kurikulum 2013 telah dirancang berbasis aktivitas siswa sehingga bersifat "man to man" yang fokus kepada siswa, dan setiap mata pelajarannya pun akan mengalami perubahan pendekatan.

Namun demikian seperti yang telah kita alami sebelumnya, perubahan kurikulum hanya sebatas perubahan dokumen. Perubahan kurikulum tersebut tidak mengubah banyak perilaku profesional guru, kepala sekolah, maupun pengawas sekolah. Perubahan menjadi sebatas wacana yang menarik untuk dijadikan bahan pelatihan dan diskusi. Pelatihan dan pengajaran cukup menyegarkan pengetahuan dan menjadi informasi baru bagi para guru, namun dalam pelaksanaan tugas kembali ke kebiasaan semula.

Meskipun begitu, menurut penulis perubahan kurikulum ini belum menjadi kebangkitan Pendidikan Pancasila secara keseluruhan. Kebangkitan Pendidikan Pancasila sebagai landasan pembentukan karakter kebangsaan memerlukan berbagai kajian yang substansial dalam pendekatan pembelajaran Pendidikan Pancasila yang lebih responsive agar Pendidikan Pancasila mampu mengatasi problematika karakter bangsa yang terus berkembang. Problematika Pendidikan Pancasila yang muncul di masa reformasi tentu memiliki kompleksitas yang berbeda dengan era sebelumnya. Perbedaan kompleksitas ini juga tidak dapat dipandang dari satu sisi atau dianggap benar-benar terpisah dari era sebelumnya karena perkembangan suatu masyarakat secara sosiologis memiliki kaitan dengan struktur sosial dan sistem budaya yang telah terbangun pada masa lalu. Kerumitan ini muncul pada pembelajaran Pendidikan pancasila karena Pendidikan Pancasila tidak sekedar pembelajaran namun juga penanaman nilai kebangsaan, sehingga pendekatan Pendidikan Kecakapan Hidup dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila merupakan suatu keharusan.

Pendidikan kecakapan hidup merupakan bagian dari pendidikan karakter yang juga tercakup dalam pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kecakapan hidup bukanlah sekedar keterampilan kerja (vokasional), WHO (1997) mendefinisikan bahwa kecakapan hidup sebagai keterampilan atau kemampuan untuk dapat beradaptasi dan berperilaku positif, yang memungkinkan seseorang mampu

menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan dalam kehidupan secara lebih efektif. Kecakapan hidup mencakup lima jenis, yaitu:

- (1) kecakapan mengenal diri,
- (2) kecakapan berpikir,
- (3) kecakapan sosial,
- (4) kecakapan akademik, dan
- (5) kecakapan kejuruan.

Kelima kecakapan hidup tersebut dalam konteks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tentunya harus bermuatan kebangsaan. Untuk itu pendidikan kecakapan hidup, pendidikan karakter dan pendidikan kewarganegaraan tidak dapat terpisahkan satu sama lain.

- Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
- Pendidikan Karakter
- Pendidikan Kecakapan Hidup

Gambar 1. Keterkaitan pendidikan kecakapan hidup, pendidikan karakter dan PPKn.

Penjelasan mengenai kecakapan hidup atau lebih sering dikenal sebagai keterampilan atau keahlian telah banyak dipublikasikan dalam berbagai bentuk media. Di institusi pendidikan, pendidikan kecakapan hidup seringkali berbentuk muatan lokal ataupun ekstrakurikuler. Di perguruan tinggi, umumnya pendidikan kecakapan hidup tidak di institusikan secara langsung dalam mata kuliah. Akan tetapi, mahasiswa dapat mengaksesnya melalui unit-unit kegiatan mahasiswa sesuai minat dan bakat yang mereka

miliki. Pada prinsipnya, kecakapan hidup merupakan jalinan atribut personalitas baik intra-personalitas maupun inter-personalitas yang dapat membedakan seseorang dengan orang lain dalam komunitasnya dan membedakan orang dengan tingkatan atau level jabatan atau karir di satu pekerjaan.

Secara filosofis, proses belajar dapat terjadi setiap saat dan segala tempat. Setiap orang, baik anak-anak maupun orang dewasa mengalami proses belajar, baik secara langsung melalui pengalaman dan penginderaan maupun berdasarkan pengetahuan yang didapat dari orang lain. Keterampilan hidup juga bisa didapat dari apa yang dijumpai atau yang dikerjakan. Secara alamiah, setiap orang akan selalu melakukan aktifitas belajar melalui pengalaman interaksinya.

Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu sistem atau proses sistematisasi pengetahuan dari proses perolehan pengalaman belajar tersebut. Pengalaman belajar tersebut diasumsikan memberikan manfaat bagi peserta didik. Pendidikan membekali para peserta didik dalam menghadapi kenyataan kehidupan sehingga mampu mengembangkan potensi yang dimiliki dan siap memecahkan per masalah kehidupan yang dihadapinya.

Intra-personalitas adalah keterampilan yang dimiliki seseorang dalam mengatur dirinya sendiri, seperti manajemen waktu, manajemen stress, manajemen perubahan, karakter transformasi, berpikir kreatif, memiliki acuan tujuan positif, dan teknik belajar cepat. Sedangkan interpersonalitas adalah keterampilan berhubungan atau berinteraksi dengan lingkungan

kelompok masyarakatnya dan lingkungan kerjanya serta interaksi dengan individu manusia sehingga mampu mengembangkan unjuk kerja secara maksimal, kemampuan memotivasi, kemampuan memimpin, kemampuan negosiasi, kemampuan presentasi, kemampuan komunikasi, kemampuan menjalin relasi, dan kemampuan bicara dimuka umum (Coates 2006).

Kecakapan hidup atau *life skills* juga menjadi perhatian bagi Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organisation*). WHO mengemukakan definisi *life skills* sebagai berikut;

keterampilan hidup atau *life skills* adalah berbagai keterampilan atau kemampuan untuk dapat beradaptasi dan berperilaku positif, yang memungkinkan seseorang mampu menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan dalam hidupnya sehari-hari secara efektif. (Depdiknas dan Unicef, 2002;1).

Definisi tersebut merupakan definisi longgar yang menyebabkan keterampilan yang dapat digolongkan sebagai kecakapan hidup sangat beragam. Keragaman bentuk keterampilan tersebut bergantung pada situasi dan kondisi sosial maupun budaya masyarakat setempat. Kecakapan hidup mencakup keterampilan untuk memperoleh penghasilan dan keterampilan dasar yang harus dimiliki secara personal seperti keterampilan berpikir dan berkomunikasi.

Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada 1997 mencetuskan bahwa pendidikan kecakapan hidup

(*life skills education*) yang mengembangkan kemampuan psikososial anak dan remaja merupakan "Program Dunia" yang harus dijalankan oleh semua negara. Konsep dasar pendidikan kecakapan hidup menurut Unicef meliputi demokratisasi, tanggung jawab dan perlindungan.

Demokrasi yang dimaksud adalah nilai demokratis mencakup penghargaan dan perlindungan hak asasi manusia termasuk hak perempuan dan anak. Konsekuensinya adalah pendidikan kecakapan hidup menggunakan metode pengajaran dalam situasi yang demokratis. Metode pengajaran tersebut diharapkan mengembangkan rasa percaya diri dan saling menghargai.

Pemikiran lain mengenai kecakapan hidup didapat dari Sharma (2009), menyebutkan bahwa kecakapan hidup adalah seluruh aspek dari *generic skills* yang juga termasuk elemen-elemen kognitif yang berhubungan dengan *non-academic skills*. Ditambahkan pula bahwa, berdasarkan hasil penelitian, tujuh kecakapan hidup yang diidentifikasi dan penting dikembangkan pada peserta didik di lembaga pendidikan tinggi, meliputi; keterampilan berkomunikasi (*communicative skills*), keterampilan berpikir dan menyelesaikan masalah (*thinking skills and Problem solving skills*), kekuatan kerja tim (*team work force*), belajar sepanjang hayat dan pengelolaan informasi (*long life learning and Information management*), keterampilan wirausaha (*entrepreneur skill*), etika, moral dan profesionalisme (*ethics, moral and professionalism*), dan keterampilan kepemimpinan (*leadership skills*).

Para ahli mengemukakan bahwa terdapat sejumlah *kecakapan hidup* yang merupakan *kecakapan dasar* yang penting, dalam meningkatkan *kesehatan* dan *kesejahteraan* anak dan remaja. Kecakapan tersebut adalah:

- Pengambilan keputusan
- Pemecahan masalah
- Berpikir kritis
- Berpikir kreatif
- Berkomunikasi yang efektif
- Membina hubungan antar pribadi
- Kesadaran diri
- Berempati
- Mengatasi emosi
- Mengendalikan stress

Kecakapan-kecakapan hidup ini merupakan "satu set kecakapan inti" yang kadangkala disebut sebagai "*emotional intelegence*" (Depdiknas, 2007 : 16).

Melalui pendekatan pendidikan kecakapan hidup (*life skills education*) penulis berkeyakinan proses pembelajaran Pendidikan Pancasila akan dapat mencapai hasil yang lebih optimal, karena pendekatan Pendidikan Kecakapan Hidup ini lebih mengutamakan proses dari pada hasil, karena proses yang baik akan menghasilkan out put yang baik pula.

## KESIMPULAN

Pendidikan merupakan medium integrasi sosial dalam sebuah sistem sosial. Pendidikan memiliki kemampuan untuk memasukkan pemahaman mengenai nilai-nilai yang berlaku dalam sistem sosial tersebut. Oleh karena itu, sekolah berperan besar dalam memasifkan pemahaman mengenai nilai-nilai yang berlaku dalam sistem sosial dan membangun

kemampuan warganegara untuk berkontribusi dalam sistem sosial negaranya.

Pendidikan kecakapan hidup (*soft skills*) dalam pendidikan kewarga-negaraan yang merupakan fondasi dasar bagi pembentukan karakter bangsa yang cerdas, baik dan kreatif adalah, merupakan bagian yang sangat penting digunakan sebagai pendekatan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, agar dapat menghasilkan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan tuntutan perubahan di era ekonomi kreatif ini.

Karakter sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam menghadapi di era globalisasi nampaknya tidak hanya kemampuan pengoperasian teknologi dan penguasaan ilmu pengetahuan dan kreatifitas inovatif, namun juga dibutuhkan kecakapan hidup yang memadai. Untuk itu, pendidikan kewarganegaraan memiliki tugas penting untuk membentuk karakter yang cerdas, baik dan kreatif sebagai manifestasi karakter bangsa dalam menghadapi tantangan globalisasi, melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan pendidikan kecakapan hidup.

Upaya merekonstruksi pembelajaran pendidikan pancasila pada kurikulum 2013 melalui pendekatan pendidikan kecakapan hidup pada dasarnya akan mendapatkan hasil yang optimal apabila pendidikan pancasila sebagai sub sistem dari Pendidikan nasional dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masa depan dan ini hanya akan dapat terwujud apabila terjadi pergeseran atau perubahan pola pikir,

antara lain dengan melakukan perubahan paradigma pembelajaran melalui pergeseran tata cara penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di dalam kelas atau lingkungan sekitar lembaga pendidikan tempat peserta didik menimba ilmu. Pergeseran itu meliputi proses pembelajaran sebagai berikut:

Selain itu melalui pembelajaran dengan pendekatan pendidikan kecakapan hidup, yang semula berpusat pada guru menuju berpusat pada siswa. Artinya jika dahulu biasanya yang terjadi adalah guru berbicara dan siswa mendengar, menyimak, dan menulis, maka sekarang guru harus lebih banyak mendengarkan siswanya saling berinteraksi, berargumen, berdebat, dan berkolaborasi, serta bermain peran (*Role Play*). Fungsi guru dari pengajar berubah dengan sendirinya menjadi fasilitator bagi siswa-siswanya. Melalui pendekatan ini pula dari satu arah menuju interaktif, artinya saat ini harus terdapat interaksi yang cukup antara guru dan peserta didik dalam berbagai bentuk komunikasinya. Guru harus berusaha membuat kelas semenarik mungkin melalui berbagai pendekatan interaksi yang dipersiapkan dan dikelola.

Komunitas ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam upayanya menjawab tantangan globalisasi memerlukan pengembangan metode pembelajaran yang sesuai dengan konteks globalisasi. Metode pembelajaran lama dengan guru sebagai sentral ataupun dengan tema-tema umum yang kaku harus dirombak dengan pendekatan Pendidikan

Kecakapan hidup. Metode pembelajaran harus mulai melibatkan peserta didik secara aktif dan aplikatif, pembahasan mengenai tema-tema kewarganegaraan perlu mengadopsi isu-isu kontemporer yang dinamis dalam bentuk simulasi-simulasi tematik untuk memacu kemampuan analitis peserta didik secara aplikatif melalui pengumpulan data, pembahasan intensif dan tanya jawab. Simulasi-simulasi praktis tersebut sangat dibutuhkan dalam pendidikan kewarganegaraan sehingga keterampilan berwarganegara tidak lagi bersifat teoritis, normatif dan doktriner namun menjadi keterampilan yang dapat diaplikasikan secara praktis, mendalam dan kritis.

Penulis juga merekomendasikan pengembangan kurikulum pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan terutama pada kajian mengenai ekonomi yang sesuai dengan falsafah Pancasila yaitu ekonomi Pancasila yang berlandaskan pada sila kelima Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kajian ini berisi tentang sistem ekonomi nasional, prinsip-prinsip ekonomi nasional, perkembangan ekonomi dunia dan prinsip ekonomi nasional yang sesuai dengan falsafah Pancasila.

#### DAFTAR PUSTAKA

Budimansyah, Dasim. (2010). *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Karakter Bangsa*. Widya Aksara Press. Bandung.

Brameld, Theodore. *Education as Power* (1965). Caddo Gap Press. San Francisco.

Cogan, J.J., (1999) *Developing the civic society the role of civic education*, CICED. Bandung.

Departemen Pendidikan Nasional, (2007). *Pendidikan Kecakapan Hidup Untuk Pencegahan HIV dan Aids*, Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani, Jakarta.

Hidayat, Komaruddin. (2012). "Pendidikan Sebagai Panglima". dalam *10 Windu Prof. DR. H.A.R, M. SC.ED PENDIDIKAN NASIONAL: Arah Kemana?*. Kompas Penerbit Buku, Jakarta.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (2013). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, SMP/MTs Kelas VII*, Jakarta.

Lutfi, Mustafa dan Halim, Fathani A. (2013). *Hitam Putih Pendidikan (Menyngkap Realitas, Merajut Solusi)*. Universitas Brawijaya Press (UB Press). Malang.

Malik, Fajar A. (2012). "Sketsa Pendidikan Nasional (Perspektif Sejarah dan Politik), dalam *10 Windu Prof. DR. H.A.R, TILAAR, M. SC.ED PENDIDIKAN NASIONAL: Arah Kemana?*". Kompas Penerbit Buku, Jakarta.

Nu'man Somantri (1969), *Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah*, Bandung : Badan Penerbit IKIP Bandung.

Rachman, Maman (2001). *Reposisi, Reevaluasi, dan Redefinisi Pendidikan*

- Nilai Bagi Generasi Muda Bangsa.* Balitbang Dikti. Jakarta.
- Sanjaya, Wina. (2009). *Strategi Pembelajaran Berorientasi pada Standar Proses Pendidikan.* Kencana Pranada Media Group. Jakarta.
- Sanusi, Ahmad (1999). *Model Pendidikan Kewarganegaraan Negara Menghadapi Perubahan dan Gejala Sosial.* Makalah dipresentasikan pada Conference on Civic Education for Civil Society, di Bandung.
- Sassen, Saskia, (2007), *A Sociology Of Globalization,* Contemporary Societies Series, W.W. Norton & Company Ltd, Castle House, London.
- Soegito, A.T., dkk. (2011). *Pendidikan Pancasila.* Pusat Pengembangan MKU & MKDK LP3 Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Soetopo, Hendayat. (2013), *Pendidikan (Untuk) Indonesia,* dalam Pengantara Pakar buku Lutfi, Mustafa dan Halim, Fathani A. (2013). *Hitam Putih Pendidikan (Menyngkap Realitas, Merajut Solusi).* Universitas Brawijaya Press (UB Press). Malang.
- Suyanto, (2001). *Formula Pendidikan Nasional Era Global.* Makalah. Disajikan dalam simposium pendidikan nasional dan munas I alumni PPS.UM. di Malang, 13 Oktober 2001.
- Suryadi, Ace. (2012). *Pendidikan, Investasi SDM, dan Pembangunan : Isu Teori dan Aplikasi Untuk Pembangunan Pendidikan dan Sumber Daya Manusia Indonesia.* Widya Aksara Press. Bandung.
- Suryana, (2013), *Ekonomi Kreatif, Ekonomi Baru: Mengubah Ide dan Menciptakan Peluang,* Salemba Empat, Jakarta.
- Susanti, Dewi. (2012). "Inovasi dan Penelitian Bagi Pemerataan Pendidikan Berkualitas". dalam *10 Windu Prof. DR. H.A.R, TILAAAR, M. SC.ED PENDIDIKAN NASIONAL: Arah Kemana?.* Kompas Penerbit Buku, Jakarta.
- Sutarto, dkk. 2008. *Buku Sekolah Elektronik, IPS untuk SMP/MTs Kelas VIII,* Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta
- Tilaar, H.A.R. (2012). *Perubahan Sosial dan Pendidikan,* (Pengantar Pedagogik Transformatif Untuk Indonesia). Penerbit Rineka Cipta. Jakarta
- Winataputra, Udin S. (2010), *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perspektif Pendidikan Untuk mencerdaskan Kehidupan Bangsa: Gagasan, Instrumentasi, dan Praksis.* Widya Aksara Press. Bandung